

RENCANA KERJA (RENJA) 2026



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1 Latar Belakang	I.1
	1.2 Landasan Hukum	I.4
	1.3 Maksud dan Tujuan	I.7
	1.4 Sistematika Penulisan	I.9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	II.1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.	II.1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	II.9
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	II.11
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.	II.26
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	II.28
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III.1
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.	III.1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.	III.9
	3.3 Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026	III.14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV.1
	4.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026	IV.1
	4.2 Matrik Renja OPD Tahun 2026	IV.3
BAB V	PENUTUP	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Target Belanja DP3AKB Kabupaten Grobogan	II.1
Tabel 2.2	: Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024	II.2
Tabel 2.3	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024	II.3
Tabel 2.4	: Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKB Kabupaten Grobogan	II.10
Tabel 2.5	: Capaian Kinerja Sasaran	II.18
Tabel 2.6	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	II.27
Tabel 2.7	: Usulan Program/Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025	II.29
Tabel 3.1	: Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.	III.8
Tabel 3.2	: Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	III.13
Tabel 3.3	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	III.14
Tabel 4.1	: Rencana Kinerja Tahunan	IV.3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi

II.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan.

Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Kabupaten Grobogan juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konstitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis. Diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 84 Ayat 1 yang mengamanatkan bahwa setelah penyampaian Rancangan Awal RKPD, Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk, berkewajiban untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan daerah Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan DP3AKB Kabupaten Grobogan untuk periode tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk yang berkembang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi :

- a. evaluasi pencapaian target program dan kegiatan,
- b. analisis kinerja pelayanan,
- c. review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan
- d. penelaahan kebijakan Nasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan secara substantive tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.

Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kementrian Tenaga Kerja, RPJM Kemendes PDT, RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 Kabupaten Grobogan, merupakan tahun ke-5 (kelima) pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang merupakan wujud 'apa' yang akan dikerjakan 'dan apa yang ingin dicapai' melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan akan menuju Visi dan Misi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai unsur pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Untuk itu prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2026 adalah mendukung **“Pemantaban Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Reformasi Birokrasi serta Pemajuan Nilai-Nilai Budaya,”** yang akan dicapai melalui **Peningkatan Kualitas Pelayanan KB dan Optimalisasi**

Proram Generasi Terencana dan dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga.
5. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.01.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolak ukur penilaian Renja DP3AKB dan sesuai tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;

Tujuan penyusunan Renja adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya pelayanan pada masyarakat.
6. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga ataupun stakeholder yang lain;
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan ;
9. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan.

V. PENUTUP.

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 akan dipaparkan dalam uraian dan analisis capaian kinerja, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan melaksanakan 9 Program dan 22 Kegiatan serta 49 Sub Kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 22.221.561.350,00** (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Anggaran bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Grobogan dengan rincian;

- a. belanja operasi sebesar **Rp. 21.332.173,350,00**, dan
- b. belanja modal sebesar **Rp. 889,388.000,00** .

Tabel 2.1
Target Belanja DP3AKB Kab. Grobogan

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	21.332.173,350,00	96, %
Belanja Modal	889,388.000,00	4 %
Jumlah	22.221.561.350,00	100,00 %

Penyerapan Anggaran Belanja tahun 2025 sebesar Rp. 21.115.433.874,00 (95,02%) dari total anggaran yang di alokasikan. Dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar Rp. 1.106.127.476,00

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan utama sebesar 96,68%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91.37%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan yang mendukung Sasaran **“Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga”** tercapai sebesar 99.18%. Sedangkan penyerapan terkecil pada Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran **“Menurunnya angka kelahiran .”** tercapai sebesar 87,5 %

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Kriteria
			Target	Realisasi	Tingkat	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	BB (76) B (77.80)	85,33	100%	6947376650	6,348,114,055	91.37	Efektif
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN IKOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja Persentase pemenuhan dokumen penilaian Capaian Level APE	100% 100% 100% Madya (0.6375-0.7724)	100% 100% 100% Madya	100% 100% 100%	6947376650	6348114055	91.37	Efektif
3	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender Kontribusi perempuan di lembaga	85.75 61.74	85,71	100% 100%	656,218,600	625,164,050	95.27	Efektif
4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	84	84	100%	515,653,200	490222150	95.07	Efektif
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100%	100%	100%	100513400	97663400	97.16	Efektif
6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Pilah Gender yang tersedia	100%	100%	100%	40052000	37278500	93.08	Efektif

No	Sasaran / Program	Indikator	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Kriteria
			Target	Realisasi	Tingkat	Target	Realisasi	%	
7	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Prosentase perkawinan dibawah	0.0160	0,032	100%	301,988,500	286,132,004	94.75	Efektif
		Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA	Madya (618,10)	Madya	100%				
		Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100	100	100%				
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	62	62	100%	10,200,000	9505600	93.19	Efektif
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Madya	Madya	100%	291,788,500	276626404	94.80	Efektif
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15 - 19	18.00	18	100%	6,474,028,600	6,078,289,365	93.89	Efektif
		Persentase Peserta KB Aktip MKJP	24.95	25,67	100%				
		Unmet Need	9.21	8.75	105%				
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya angka kelahiran	21	21	100%	622340200	544,813,050	87.54	Efektif
12	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif	79	78	100%	5851688400	5,533,476,315	94.56	Efektif
13	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB,BKR,BKL dan	85.00	85	100%	7841949000	7777734400	99.18	Efektif
		Persentase penurunan keluarga	31.25	30.48	103%				
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL,PPPKS).	90	90	100%	7841949000	7777734400	99.18	Efektif
JUMLAH						22,221,561,350	21,115,433,874	95.02	

Dokumen RENJA PD Tahun 2026 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi pogram dan kegiatan Tahun 2026.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 dijabarkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025.

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2028	sat	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2028		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2028	
			K		Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2028	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(9+8+10)	12=11/4	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PUG	0.88	%	8.6	8.8	8.88	100.84	8.80	8.80	1000.00	
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik		Nilai Evaluasi SAKIP P	BB (73.5)	3 skor	B (88)	BB (70)	BB (76)	107.14	BB (76.16)	BB (76.16)	102.13	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (78.70)	3 skor	B (78.14)	B (77.70)	B (77.78)	100.1	B (78.70)	B (78.70)	100.00	
2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan sesuai standart akuntansi publik	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00	
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00	
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20	Dok	4	4	2	50	4	10.00	50.00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Adm. Keuangan yang tersusun	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72	Org	25	25	27	108.00	24	78.00	105.58	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengadministrasian Barang yang tersusun.	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00	
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3	Lap	1	1	1	100	1	3.00	100.00	

2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase pelaksanaan pelayanan adm. Umum	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Paket	4	4	8	200.00	4	16.00	133.33
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket	4	4	6	150.00	4	14.00	116.67
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Paket	2	2	1	50.00	3	6.00	100.00
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	Dok	2	2	2	100.00	2	6.00	100.00
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	3	Paket	1	1	1	100.00	1	3.00	100.00
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	Lap	12	12	10	83.33	14	36.00	100.00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	12	Unit	4	4	4	100.00	4	12.00	100.00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase ketersediaan jasa penunjang urusan PD	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36	Lap	12	12	10	83.33	14	36.00	100.00
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	36	Lap	12	12	10	83.33	14	36.00	100.00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Lap	12	12	10	83.33	14	36.00	100.00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	100	%	100	100	100	100	100	300.00	300.00
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	Unit	2	2	1	50.00	3	6.00	100.00
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	Unit	5	5	2	40.00	8	15.00	100.00
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	Unit	4	4	2	50.00	6	12.00	100.00
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	9	Unit	3	3	3	100.00	3	9.00	100.00

		Capaian Level APE	Madya (0.637-0.7724)	Level	Madya	Madya (4850)	Madya (4850)	100	Madya (0.637-0.7724)	Madya (0.637-0.7724)	100.00
Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	84	%	70	84	85.71	102.04	85.75	85.75	102.08
		Persentase Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah	52	%	53.68	60	61.72	102.87	61.75	61.75	118.75
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	84	%	78	82	82	100	84	84.00	100.00
2.08.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender	84	%	80	82	82	100	84	84.00	100.00
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten/ kota	3	dok	1	1	1	100	1	3.00	100.00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	80	%	70	75	75	100	80	80.00	100.00
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/ kota	3	dok	1	1	1	100	1	3.00	100.00
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3	Organisasi	1	1	1	100	1	3.00	100.00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	70	%	78	48	48	100	70	70.00	100.00
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3	Lembaga	1	1	1	100	1	3.00	100.00
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	Dok	1	1	1	100	1	3.00	100.00

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	80	%	62	75	75	100	80	80.00	100.00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Aktive	75	%	60	70	70	100	75	75.00	100.00
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dok	1	1	1	100	1	3.00	100.00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan upacara	10	Keg	2	2	2	100	6	10.00	100.00
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	P D	0	1	1	100	2	3.00	100.00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	Lap	2	1	1	100	1	4.00	133.33
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data pilah gender yang disediakan oleh OPD	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terkumpulnya data pilah gender dari OPD	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/ kota yang tersedia	3	dok	1	1	1	100	1	3.00	100.00

Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak		Persentase Perkawinan Di Bawah Umur 19 Tahun	0.0456	%	0.0209	0.0505	0.01802	165	0.048	0.05	100.00
		Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA	Madya (637.5-772.4)	Level	Madya	Madya	Madya	100	Madya (637.5-772.4)	Madya (637.5-772.5)	100.00
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Madya (0,6375-0,7724)	Level	Madya (637.5-772.5)	Madya	Madya (618.10)	100	Madya (637.5-772.4)	Madya (637.5-772.5)	100.00
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Lembaga yang Aktif dalam perlindungan Hak Anak (PHA)	100	%	62	76	76	100	100	100.00	100.00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3	Organisasi	0	1	1	100	2	3.00	100.00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Korban kekerasan yang Aktif	36	%	62	64	64	100	36	36.00	100.00
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	102	org	65	32	32	100	5	102.00	100.00
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dok	1	1	1	100	1	3.00	100.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kekerasan terhadap Anak	90	%	0	0	0	0	90	90.00	100.00
	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.	100	%	0	0	0	0	100	100.00	100.00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	144	org	0	0	0	0	144	144.00	100.00

2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Total Fertility Rate (TFR)	2.26	%	1.99	2.4	2.21	107.92	2.16	2.18	103.54
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana		ASFR 15-19	18	%	19.2	18.8	7.57	159.73	18	18.00	100.00
		Persentase Peserta KB Aktif MKJP	25	%	23.16	24.5	78.01	318.41	25	25.00	100.00
		UNMET NEED	9.5	%	9.51	9.5	9.22	102.95	9.8	9.80	103.16
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertility Rate) / Persentase Penurunan Angka Kelahiran	21	%	29	2.4	2.21	107.92	21	21.00	100.00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Buku Grand Design Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 20 21 - 2025	110	Dok	10	23	23	100	77	110.00	100.00
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dok	1	1	1	100	1	3.00	100.00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan RR Klinik KB	20	Lap	4	4	4	100	12	20.00	100.00
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	15	Lap	0	5	5	100	10	15.00	100.00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	840	Lap	0	280	280	100	560	840.00	100.00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3	Dok	1	1	1	100	1	3.00	100.00

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif	79.50	%	77.5	78	77	98.72	79.5	79.50	100.00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Peningkatan Peserta KB dengan Metode Jangka Panjang	30	%	24	25	21.96	87.84	30	30.00	100.00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30	Organisasi	10	10	10	100	10	30.00	100.00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	140	Dok	60	1	1	100	79	140.00	100.00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	30	Lap	0	10	10	100	20	30.00	100.00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan di Kecamatan	19	Kec	0	19	19	100	0	19.00	100.00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	169	Lap	83	1	1	100	85	169.00	100.00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB.	100		100	100	100	100	100	100.00	100.00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan	279	Lap	0	93	93	100	186	279.00	100.00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20	%	0	23.15	23	99.35	23	46.00	230.00
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah item sarana penunjang layanan KB	36	item	0	12	12	100	24	36.00	100.00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan	279	Lap	0	93	93	100	186	279.00	100.00

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	82	%	82	84	84	100	85	85.00	103.66
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB	68	Kampung KB	0	68	68	100	68	68.00	100.00
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	87	Org	82	0	0	0	5	87.00	100.00
Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga		Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB,BKR,BKL dan UPPKS)	86	%	79.91	84	84.27	100.32	86	86.00	100.00
		Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	30.50	%	32.97	31.5	31.13	101.17	31.5	31.50	103.28

Dari tabel tersebut tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja **“Capaian Level APE (Anugerah Parahita Ekapraya)”** Merupakan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini pada level Madya, atau tercapai sebesar 100% dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan di Kabupaten Grobogan. Pencapaian Indikator ini ditandai dengan adanya Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai Kabupaten Penerima Parahita Ekapraya Tahun 2025 Kategori Madya. Pemerintah Kabupaten Grobogan mampu mempertahankan Capaian APE pada Level Madya tiap tahunnya.
2. Capaian Indikator Kinerja **“Persentase Lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan PUG”**

Merupakan Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 85,71%, atau tercapai sebesar 99% dari target yang direncanakan sebesar 85,75%. Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan lembaga non Pemerintah yang aktif dalam PengarusUtamaan Gender di Kabupten Grobogan.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami peningkatan sebesar 8.71% dibanding realisasi tahun 2024 sebesar 77%, dan telah melampaui target

akhir RENSTRA PD 2021-2026 yakni 84 %, sehingga tingkat capaian indikator ini dibanding target akhir RENSTRA sebesar 99 %.

3. Capaian Indikator Kinerja “**Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah**”

Merupakan Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 61.74%, atau tercapai sebesar 100% dari target yang direncanakan sebesar 61,74%. Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah perempuan yang bersedia untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui Lembaga Pemerintahan Daerah di Kabupten Grobogan. Realisasi kinerja indikator ini mengalami peningkatan sebesar 2.12% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 59.60% dan telah melampaui target akhir RENSTRA PD 2021-2026 yakni sebesar 52%, sehingga tingkat capaian indikator ini dibanding target akhir RENSTRA sebesar 100 %.

4. Capaian Indikator Kinerja “**Persentase Perkawinan dibawah umur 19 tahun**”

Merupakan Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 0.032, atau tercapai sebesar 50 % dari target yang direncanakan sebesar 0.016. Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupten Grobogan.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan realisasi tahun 2024 yakni sebesar 0.0170. Namun capaian ini telah melampaui target akhir RENSTRA PD 2021-2026 yakni sebesar 0.0456, sehingga tingkat capaian indikator ini dibanding target akhir RENSTRA sebesar 105 %.

5. Capaian Indikator Kinerja **“Tingkat Capaian KLA/Indek PUHA”**

Merupakan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak** dapat tercapai atau tidak.

Pencapaian Indikator ini ditandai dengan adanya Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 Kategori Madya. Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal itu dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

6. Capaian Indikator Kinerja **“Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban”**

Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 100%, atau tercapai sebesar 100% dari target yang direncanakan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu memberikan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang meliputi :

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

7. Capaian Indikator Kinerja “**Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19**”

Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 18, atau tercapai sebesar 100% dari target yang direncanakan sebesar 18%. Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah kelahiran tiap 1.000 (seribu) perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun di Kabupaten Grobogan.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan realisasi tahun 2024 yakni sebesar 22% dan telah melampaui target akhir RENSTRA PD 2021-2026 sebesar 18%. sehingga tingkat capaian indikator ini dibanding target akhir RENSTRA sebesar 100 %.

8. Capaian Indikator Kinerja “**Persentase Peserta KB Aktif MKJP**”

Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 25,67%, atau tercapai sebesar 103% dari target yang direncanakan sebesar 24,85%. Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah peserta KB dengan METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) di Kabupaten Grobogan.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,94% dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 24.10%. dan telah melampaui target akhir RENSTRA PD 2021-2026.

9. Capaian Indikator Kinerja “**Unmet Need**”

Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana** dapat tercapai atau tidak.

Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 8,75%, atau tercapai sebesar 102.95% dari target yang direncanakan sebesar 9.2%. Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Grobogan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi di Kabupten Grobogan.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2024 dan jika di bandingkan dengan target Akhir RENSTRA PD 2021-2026 telah melampaui target.

10. Capaian Indikator Kinerja **“Persentase Anggota Kelompok Pembangunan Keluarga Aktif (BKB,BKR,BKL dan UPPKS)”**

Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 85 % atau tercapai sebesar 100. % dari target yang direncanakan sebesar 85.00%. Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) di Kabupten Grobogan.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA PD 2021-2026 baru mencapai sebesar 100 %.

11. Capaian Indikator Kinerja **“Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera”**

Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 30,48%, atau tercapai sebesar 102.17% dari target yang direncanakan sebesar 31.25%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peunurunan jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kabupten Grobogan.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA PD 2021-2026 baru mencapai sebesar 97.93 %.

12. Capaian Indikator Kinerja “**Nilai evaluasi SAKIP PD**”

Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini masih menunggu penilaian.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu melaksanakan proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja dengan baik.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2025 dan telah melampaui target Akhir RENSTRA PD 2021-2026 yakni sebesar BB (73.50).

13. Capaian Indikator Kinerja “**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**”

Indikator ini untuk mengukur apakah **Sasaran Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik** dapat tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 85,33 point **Level B**, atau tercapai sebesar 109,60% dari target yang direncanakan sebesar 77,70 point **Level B**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mampu membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Adil, Transparan, dan Akuntabel.

Realisasi kinerja indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA PD 2021-2026 baru mencapai sebesar 103 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3AKB Kabupaten Grobogan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak,

maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AKB Kabupaten Grobogan. Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3AKB Kabupaten Grobogan digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel 2.4.

tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AK Kabupaten Grobogan

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
I.	Hasi Penilaian PUG			0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	9.69	9.09	9.10	9.10	
1	Capaian Level APE			Madya (4800)	Madya (4850)	Madya (4900)	Madya (4950)	Madya (5000)	Madya (4850)	Madya (4900)	Madya (4950)	Madya (5000)	
2	Persentase Lembaga Non Pemerintah yang Aktif Melaksanakan PUG			70%	72%	74%	76%	78%	77%	85,71%	85.75%	84%	
3	Persentase Kontribusi Perempuan di lembaga Pemerintah			51.20%	51.40%	51.60%	51.58%	52.00%	59.60%	61.72%	61.74%	52.00%	
4	Persentase Perkawinan di Bawah Umur 19 Tahun			0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	0.0017	0.01802	0.0160	0.0610	
5	Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA			Madya (794)	Madya (814)	Madya (834)	Madya (854)	Madya (874)	Madya (618.10)	Madya (834)	Madya (854)	Madya (874)	
6	Persentase Korban yang dilayani sesuai standart			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
II.	TFR (Total Fertility Rate)			2.28	2.25	2.2	2.18	2.16	2.21	2.01	2.03	2.16	
7	ASFR 15-19			13	13	12	12	11.5	22	7.57	18	18	
8	Persentase Peserta KB Aktif MKJP			23	23.5	24	24.5	25	24.1	78.01	24.95	25	
9	Unmet Need			10.84	10.44	10.1	9.81	9.5	9.58	9.22	9.21	9.2	
10	Persentase Anggota Kelompok Pembangunan Keluarga Aktif (BKB,BKR,BKL,dan UPPKS)			82	83	84	85	86	81.41	84.27	85	86	
11	Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera			32.5	32	31.5	31	30.5	32.49	31.13	31.25	31.5	
III	Nilai Evaluasi SAKIP PD			B (65)	B (65)	B (65)	B (65)	B (65)	B (64.25)	BB (75)	BB (76)	BB (76)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B (76.70)	B (77.20)	B (77.70)	B (78.20)	B (79.70)	B (77.48)	B (77.78)	B (77.80)	B (79.70)	
12	Nilai Evaluasi SAKIP PD			B (65)	B (65)	B (65)	B (65)	B (65)	B (64.25)	BB (75)	BB (76)	B (76)	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B (76.70)	B (77.20)	B (77.70)	B (78.20)	B (79.70)	B (77.48)	B (77.78)	B (77.80)	B (79.70)	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2021, tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan adalah pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

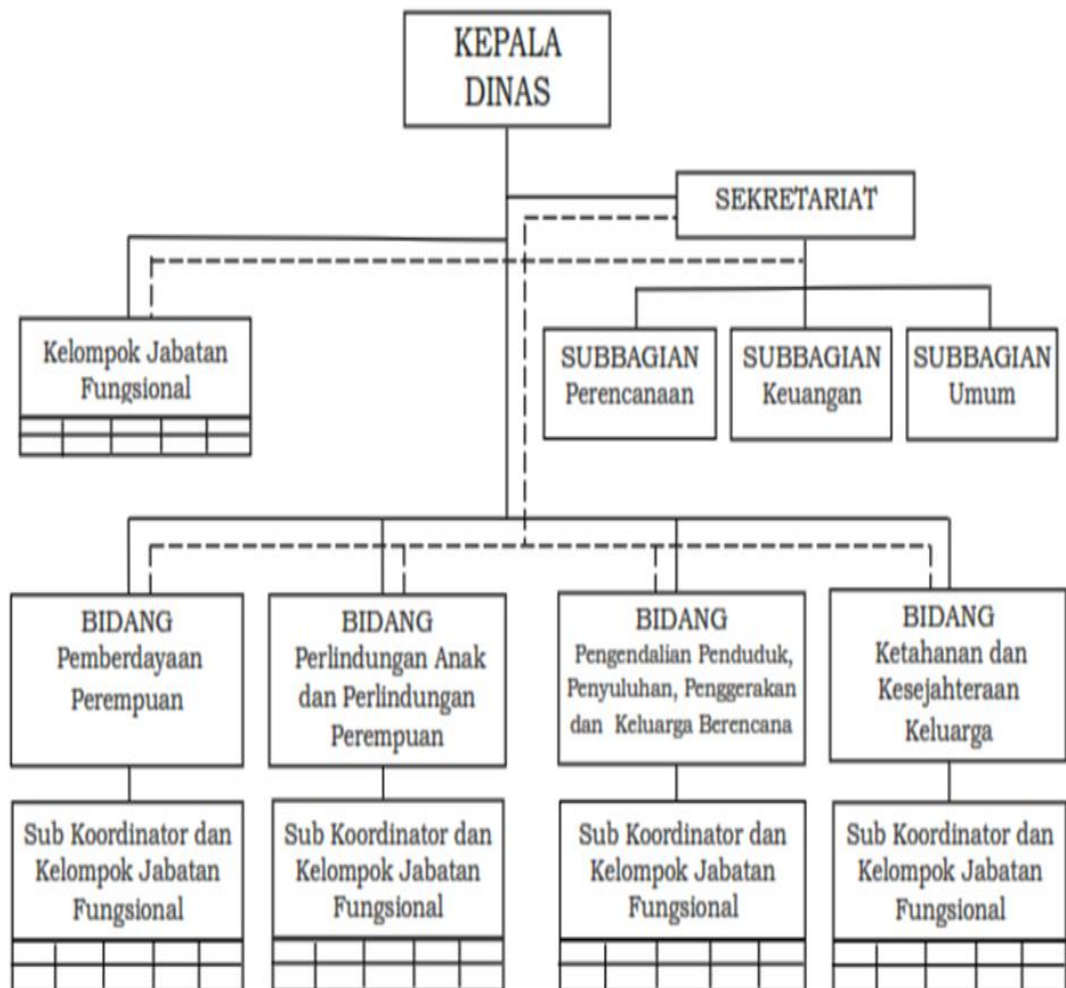
Kepala Dinas, membawahi 1 Sekretaris dan 4 (empat) bidang.

1. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sub Koordinator Pengarusutaman Gender;
 - Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - Sub Koordinator Data dan Informasi Gender.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perlindungan Anak Dan Perlindungan Perempuan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan;
 - Sub Koordinator Pembinaan Potensi dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - Sub Koordinator Pembinaan Potensi dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan Dan Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sub Koordinator Distribusi Alokasi, Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - Sub Koordinator Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi PLKB dan KIE;

- Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - Sub Koordinator Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja.

Yang disajikan dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar II.1 Struktur Organisasi



2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan DP3AKB Kabupaten Grobogan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan tahun 2025 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran / Program	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat capaian
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (76)		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B (77.80)	85,33	100%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi	100%	100%	100%
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Level APE	Madya (0.6375-0.7724)	Madya	100%
		Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	85.75	85,71	100%
		Kontribusi perempuan di lembaga	61.74	61,74	100%
4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	84	84	100%
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100%	100%	100%
6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Pilah Gender yang tersedia	100%	100%	100%

No	Sasaran / Program	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat capaian
7	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Prosentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	0.0160	0,032	100%
		Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA	Madya (618,10)	Madya	100%
		Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100	100	100%
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	62	62	100%
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Madya	Madya	100%
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15 - 19	18.00	18	100%
		Persentase Peserta KB Aktif MKJP	24.95	25,67	100%
		Unmet Need	9.21	8.75	105%
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya angka kelahiran	21	21	100%
12	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif	79	78	100%
13	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (	85.00	85	100%
		Persentase penurunan keluarga	31.25	30.48	103%
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PPPKS).	90	90	100%

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

- ✓ Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia dari formasi yang dibutuhkan;
- ✓ Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, yang masih perlu pengembangan;

- ✓ Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.

Permasalahan dan hambatan tersebut tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional, dikarenakan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada dioptimalkan dengan sebaik-baiknya.

Capaian target indikator kinerja daerah Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2025 sebanyak 16 indikator dan telah tercapai keseluruhan, sedangkan capaian target indikator kinerja daerah Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebanyak 8 indikator, 3 telah tercapai dan 5 belum tercapai dengan tingkat capaian rata-rata 92,54%. Kekurangan tercapaian tersebut lebih dikarenakan faktor eksternal yang berkembang di masyarakat.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.

Sampai dengan tahun 2025 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan, sehingga data yang akurat dan cepat serta periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat.

2. Tenaga Kerja Perempuan.

Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan.

Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain.

3. Politik dan Pengambilan Keputusan.

Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya.

4. Ekonomi

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L).

Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kenaikan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal.

Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan

yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

5. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.

Belum efektifnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari:

- a. Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan;
- b. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan
- c. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

6. Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak.

- a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
- b. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik. Pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/ menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum.
- c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami

eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik.

- d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum (APH) memperlakukan anak seperti orang dewasa.
- e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di K/L dan Pemda selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari:
 - 1) Meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak;
 - 2) Masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta
 - 3) Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
- f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan.
- g. Masih tingginya angka drop-out sekolah, masih rendahnya angka partisipasi sekolah, belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain

ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal.

Selain itu, juga belum tersedia panduan bagi semua individu yang bekerja dengan anak dalam ranah bermain dan rekreasi yang ramah anak.

- h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).

7. Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, meliputi :

- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program.
- b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak.
- c. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.
- d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat.
- e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.
- f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

1. Metode fasilitasi dan mekanisme operasional dilapangan dalam pelaksanaan Program KB belum optimal.
2. Sarana dan prasarana pelayanan operasional, pembinaan dan pergerakan masih kurang.
3. Kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung program masih kurang.
4. Tingginya penggunaan alat kontrasepsi non MKJP.
5. Tingginya angka kehamilan/kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun).

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- A. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
- B. Upaya optimalisasi program generasi terencana minim peningkatan.
- C. Kualitas Pelayanan KB akan sulit ditingkatkan.
- D. Timbal balik pemerintah dan masyarakat tidak terealisasi yang mana hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparatur negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3AKB Kabupaten Grobogan.

A. TANTANGAN

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi.
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak.
- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG.
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih

belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level.

- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utama Gender (PUG).
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja.
- Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah.
- Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.
- Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak.
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB.

B. PELUANG

- ✓ Menguatnya isu Gender.
- ✓ Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA.
- ✓ Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial.
- ✓ Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan.
- ✓ Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja.
- ✓ Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Grobogan.
- ✓ Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
- ✓ Kemajuan teknologi informasi.
- ✓ Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana.

- ✓ Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- ✓ Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- ✓ Kemudahan informasi tentang KB.
- ✓ **Animo** masyarakat untuk ber KB cukup tinggi.

C. KEKUATAN

- Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3AKB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll).
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
- SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
- Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Terbentuknya jejaring kelembagaan.
- Koordinasi yang baik dengan OPD terkait.

D. KELEMAHAN

- ❖ Kurang optimalnya sarana dan prasarana koordinasi dengan OPD terkait
- ❖ Reward and Punishment belum berjalan optimal.
- ❖ Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- ❖ Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal.
- ❖ Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal.
- ❖ Anggaran masih terbatas.
- ❖ Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- ❖ Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan.
- ❖ Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender.

- ❖ Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan.

2.3.5 Isu – Isu Strategis DP3AKB Kabupaten Grobogan.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang perlu di tindak lanjuti dalam pemnyusunan program dan kegiatan, antara lain :

A. *Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.*

1. *Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :*

- a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO.
- c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

2. *Perlindungan Anak :*

- a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
- b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
- c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

B. *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.*

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Kabupaten Grobogan.
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Masyarakat.
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD.

4. Meningkatkan kesadaran masarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB.
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja.
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi penlindung anak-anak untuk berkembang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah tahapan akhir dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. RKPD memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan priorotas daerah.

Penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD. Penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini juga memperhatikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.

RKPD Kabupaten Grobogan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Grobogan dan Renstra DP3AKB Kabupaten Grobogan maka DP3AKB Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam melaksanakan review rancangan awal RKPD proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan, banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD dapat dilaksanakan.
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan dengan rancangan Renstra 2025-2029.
- Besarnya dana dalam rancangan awal RKPD belum di tetapkan.
- Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Awal RKPD*

Review rancangan RKPD tahun 2026 terhadap hasil analisa kebutuhan pada DP3KB Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN IKOTA	Grobogan	Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi publik	%	100	4,039,154,000
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	1,738,646,250
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko	%	100	6,848,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Grobogan	Tepenuhinya kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah.	%	100	6,848,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	6,848,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Grobogan	Persentase dokumen penyelenggaraan Administrasi Keuangan SPD - DP3AKB	%	100	4,039,154,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	30	4,039,154,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Grobogan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	9,351,300
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	9,351,300
		Volume Rakor	kali	2	

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Grobogan		%	100	662,510,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	11	662,510,000
			Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Grobogan	Persentase Administrasi Umum di SKPD	%	100	378,646,250
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	4,396,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	35,824,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	22,194,750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4,200,000
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,955,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	271,076,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Grobogan	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	%	100	23,378,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	23,378,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Grobogan	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	%	100	264,681,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2,480,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	240,478,500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	21,723,000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Grobogan	<i>Persentase Terpeliharanya Barang milik daerah</i>	%	100.00	400,079,200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3.00	29,650,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8.00	42,381,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	283,986,200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69.00	44,062,000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Grobogan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	%	84.00	320,000,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Grobogan	Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender	%	84.00	40,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	Dokumen	4.00	40,000,000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Grobogan	Persentase partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	80.00	200,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	4.00	80,000,000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3.00	120,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Grobogan	Persentase peserta yang terfasilitasi dalam PUG	%	63.00	80,000,000
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1.00	40,000,000
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1.00	40,000,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Grobogan	Persentase Data Pilah Gender yang tersedia	%	100.00	20,000,000
<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Grobogan	<i>Persentase OPD yang mengumpulkan Data Pilah Gender</i>	%	100.00	20,000,000
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2.00	20,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Grobogan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	62.00	-
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Grobogan	<i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten</i>	%	62.00	-
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	-
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Grobogan	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Nilai	Madya	190,000,000
<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Grobogan	<i>Persentase Lembaga yang aktif dalam dalam PHA</i>	%	78.00	50,000,000
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	4.00	50,000,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Grobogan		%	68.00	140,000,000
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40.00	20,000,000
			bulan	12.00	20,000,000
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4.00	120,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Grobogan	Menurunnya angka kelahiran	%	21.00	283,200,000
<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	Grobogan	<i>Tersusunnya dokumen Grandesign</i>	<i>dokumen</i>	<i>1.00</i>	-
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	-
<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Grobogan	<i>Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan RR Klinik KB</i>	<i>Laporan</i>	<i>4.00</i>	<i>283,200,000</i>
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen	5.00	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1.00	-

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1.00	168,000,000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	115,200,000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Grobogan	Cakupan peserta KB aktif	%	79.00	3,191,382,000
<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	Grobogan	<i>Persentase kualitas pelaksanaan program KB</i>	%	27.00	320,880,000
Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	10	-
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	280,896,000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	10	-
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Operasional dan Sarana di	Laporan	10	-

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	39,984,000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKPIPLKB)	Grobogan	Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam POKTAN	%	80.00	105,000,000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kegiatan	5.00	105,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PKPIPLKB)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PKPIPLKB)			
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Grobogan	Persentase kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%	84	2,765,502,000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	93	386,400,000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	6362	2,379,102,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Grobogan	Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL,PPPKS).	%	90	7,392,000,000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Grobogan	Cakupan pengetahuan tentang pengolahan pangan	%	80	-
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Unit	10	-
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Laporan	1	-
OrientasiPelatihan Teknis PelaksanaKader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	16	-
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Laporan	1	-
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Grobogan	Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	%	80.00	7,392,000,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	K	
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Jumlah Laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	3	3,360,000,000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	10	4,032,000,000
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga					
JUMLAH					17,181,230,250

Pada Tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan menitikberatkan pada *Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas. Pengurangan Stunting dan Peningkatan Gizi Masyarakat.*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat, yaitu untuk menjaring kegiatan aspirasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi – Asosiasi, maupun hasil pengumpulan informasi sendiri terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun 2026.

Forum Organisasi Perangkat Daerah sebagai sarana dua arah atau wadah organisasi dalam memberikan ruang bagi masyarakat, stakeholder, lembaga dinas / instansi terkait dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyusun dan merencanakan program kerja pembangunan tahun 2026. Sebagai OPD yang menangani dan terkait isu-isu strategis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, rancangan Renja DP3AKB Kabupaten Grobogan didiskusikan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil MUSRENBANG RKPD Kabupaten dan Kecamatan.

Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP3AKB Kabupaten Grobogan selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD serumpun. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan-usulan tersebut disajikan pada **tabel 2.7** :

Tabel 2.7
Usulan Program/Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA).	Grobogan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pernikahan Dini di anak usia sekolah SMP dan SMA	Madya	Kategori	Pokir DPRD Fraksi GERINDA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.	Grobogan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Korban kekerasan yang aktif	68	%	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK) PEEMPUAN DAN ANAK POLRES
	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Grobogan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemn PPPA) merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024–2029. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada massa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2024.

Visi Kemen PPPA

Visi Kemen PPPA mengacu pada Visi Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu **“Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana.”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kemen PPPA melakukan berbagai upaya, diantaranya :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Mewujudkan kebijakan yang responsif gender, berkesetaraan, dan berkeadilan gender.
3. Mewujudkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.
5. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
6. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Misi Kemen PPPA

Misi Kemen PPPA mengacu pada Misi Kabinet Merah Putih yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda

pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Misi Kemen PPPA Tahun 2024-2029 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Merah Putih, yakni 8 Misi yang disebut Asta Cita :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Dari 8 (delapan) Misi diatas, yang paling sesuai dengan

1. *Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.*

Pembangunan SDM harus dilaksanakan secara berkualitas untuk mencapai kemajuan yang berkeselimbangan antara laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan secara inklusif mulai dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemen PPPA berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan

perempuan dan anak melalui penyusunan kebijakan/program yang memperhatikan keeluasaan akses pendidikan yang tinggi, menguasai ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), yang berdampak positif untuk menciptakan masyarakat beradab dan saling menghargai tanpa diskriminasi khususnya kepada perempuan dan anak.

2. *Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.*

Perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki secara inklusif harus diberi kemudahan untuk memperoleh akses dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang pada gilirannya dapat membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas, tercegahnya tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. *Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing*

Bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berkualitas akan berdampak pada produksi barang dan jasanya yang berkualitas. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam

memberikan kontribusi dalam tersedianya kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang tinggi, sehingga bangsa Indonesia memiliki daya saing tinggi pada tingkat nasional, regional dan global.

4. *Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan*

Peningkatan kualitas hidup manusia yang berdaya saing tidak lepas dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemen PPPA dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak senantiasa melakukan

koordinasi dan sinergi bersama K/L dan Pemda dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya, Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Rumusan Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

NO	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak.
2	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.
3	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.
4	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan Sistem Data Gender dan Anak.
5	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti.
6	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA.

Sasaran Strategis Kemen PPPA

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing:

Tujuan 1 : Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2 : Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3 : Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - 1) Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - 2) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- b. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
 - 1) Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - 2) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - 3) Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
 - 1) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - 2) Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - 3) Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
- b. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
 - 1) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - 2) Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - 3) Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
 - 4) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
- c. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
 - 1) Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - 2) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
- d. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;

- e. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
- f. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana *Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota*.

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Grobogan diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Grobogan digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2025 – 2029, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi bupati dan wakil bupati Kabupaten Grobogan, yang mana visi tersebut ***“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*** dan memiliki misi sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan;
2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya;
4. Membangun infrastruktur yang andal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.

Misi yang memiliki kaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan adalah misi ketiga (ke-3) ***“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya”***.

TUJUAN

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dari misi organisasi yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Tujuan berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah lima tahunan, yang disusun berdasarkan visi dan misi serta mempertimbangkan hasil analisis strategis atas isu-isu utama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Meskipun tidak selalu dirumuskan secara kuantitatif, tujuan harus merefleksikan capaian ideal yang menjadi orientasi pembangunan ke depan.

Tujuan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan guna merealisasikan misi organisasi. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah periode 2025–2029, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan juga berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, serta mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, kelompok sasaran yang dilayani, arah pembangunan organisasi, serta isu-isu strategis daerah di bidang PPPA dan KB. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah: **Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga yg berkualitas** dengan indikator: 1) Indeks Ketimpangan Gender (IKG); 2) Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

SASARAN

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan adalah:

Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender, dengan indikator sasaran yaitu: 1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD; 2) Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak dan Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Sasaran 2: Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran yaitu: 1) TFR; 2) Presenatse Peserta KB Aktif MKJP dan 3) *Unmeed Need*.

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran: 1) Nilai AKIP Perangkat Daerah; 2) Nilai IKM Perangkat Daerah dan 3) Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

a. Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga, yang ditandai dengan :

- 1) Prosentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB,BKR,BKL dan UPPKS).
- 2) Persentase penurunan kelurga Pra Sejahtera.

b. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik, yang di tandai dengan :

- 3) Hasil Evaluasi SAKIP PD.
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD

Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat dianalisa dari capaian Indikator Kinerja yang di gunakan. Indikator Kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target dan tujuan organisasi. Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Kinerja dan Indikator Kinerja yang ingin di capai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana pada tahun 2026 di uraikan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Kinerja dan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Tahun 2026 DP3AKB

NO.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan anak serta keluarga		1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indek %	0,378 - 0,367
2			2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indek	61,17
3			3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indek	63,43- 63,49
4	Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender		Persentase ARG pada belanja langsung APBD		10
5			Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	rasio	0,52
6			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio (per 100.000 penduduk perempuan)	4
7	Meningkatnya laju pengendalian penduduk dan kualitas keluarga		TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,14
8			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	%	78,10
9			Unmet Need (Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	%	8,5
10	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	skor	BB (75,50)
11			Nilai IKM Perangkat daerah	skor	B(77,80)
12			Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	skor	3,285

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam mendukung pencapaian target indikator Pembangunan Daerah Tahun 2026 dan sebagai bagian integral dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045.

Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka rumusan program dan kegiatan Renja Tahun 2026 disusun guna mendukung capaian Visi Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yaitu “Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” Terutama guna mendukung Misi ke-1 RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045, yaitu “Transformasi Sosial guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkesetaraan Gender” dan guna mendukung Misi ke-3 Kabupaten Grobogan 2025-2045, yaitu “Transformasi Tata Kelola guna mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan,

Rumusan program dan kegiatan Renja tahun 2026 juga mempertimbangkan untuk mendukung arah Kebijakan Prioritas Rancangan RPJMD 2025-2029, yakni “Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data pilah gender dan anak serta Peningkatan kualitas Program Keluarga Berencana dan pemberdayaan keluarga dalam rangka pengendalian penduduk,” serta untuk mendukung pencapaian SDG’s dengan indikator antar lain :

1. Persentase ARG di Perangkat Daerah;
2. Persentase Korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif;
3. Persentase peningkatan produktifitas perempuan;
4. Persentase ketersediaan sistem data gender dan anak yang terintegrasi di tingkat daerah Kabupaten / Kota;
5. Persentase Jumlah Desa yang Layak Anak;
6. Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif;
7. ASFR 15-19 tahun;
8. Persentase KB Aktif;
9. Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA);

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2026 terdiri dari 9

(sembilan) program; 23 (dua puluh tiga) kegiatan serta 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan.

Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirumuskan sebesar Rp 17.181.230.250,00 (Tujuh belas milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian pagu indikatif pada urusan Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender sebesar Rp 7.922.000.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) pagu indikatif pada urusan Meningkatnya laju pengendalian penduduk dan kualitas keluarga sebesar Rp 3.474.582.000,00 (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Serta urusan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah sebesar 5.784.648.250 (Lima milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Program dan kegiatan Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan lebih terperinci dapat disajikan dalam Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026			Prakiraan Maju rencana 2027		
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Grobogan	Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi publik	%	100	4,039,154,000	DAU	100	4,443,069,400
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	1,738,646,250	DAU	100	1,912,510,875
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko	%	100	6,848,000	DAU	100	7,532,800
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Grobogan	Tepenuhinya kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	6,848,000	DAU	100	7,532,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	6,848,000	DAU	3	7,532,800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Grobogan	Persentase dokumen penyelenggaraan Administrasi Keuangan SPD - DP3AKB	%	100	4,039,154,000	DAU	100	4,443,069,400
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	30	4,039,154,000	DAU	30	4,443,069,400
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Grobogan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	9,351,300	DAU	100	10,286,430
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	9,351,300	DAU	2	10,286,430

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026				Prakiraan Maju rencana 2027	
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Grobogan		%	100	662,510,000	DAU	100	728,761,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	11	662,510,000	DAU	11	728,761,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Grobogan	Persentase Administrasi Umum di SKPD	%	100	378,646,250	DAU	100	416,510,875
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	4,396,000	DAU	10	4,835,600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	35,824,000	DAU	5	39,406,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	22,194,750	DAU	5	24,414,225
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4,200,000	DAU	2	4,620,000
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,955,500	DAU	1	45,051,050
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	271,076,000	DAU	12	298,183,600

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026			Prakiraan Maju rencana 2027		
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Grobogan	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	%	100	23,378,000	DAU	100	25,715,800
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	23,378,000	DAU	2	25,715,800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Grobogan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	100	264,681,500	DAU	100	291,149,650
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2,480,000	DAU	12	2,728,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	240,478,500	DAU	12	264,526,350
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	21,723,000	DAU	12	23,895,300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Grobogan	Persentase Terpeliharanya Barang milik daerah	%	100.00	400,079,200	DAU	100.00	440,087,120
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3.00	29,650,000	DAU	3.00	32,615,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8.00	42,381,000	DAU	8.00	46,619,100

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026			Prakiraan Maju rencana 2027		
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	283,986,200	DAU	1.00	312,384,820
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69.00	44,062,000	DAU	69.00	48,468,200
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Grobogan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	%	84.00	320,000,000	DAU	84.00	352,000,000
<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Grobogan	<i>Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender</i>	%	84.00	40,000,000	DAU	84.00	44,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	Dokumen	4.00	40,000,000	DAU	4.00	44,000,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026				Prakiraan Maju rencana 2027	
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Grobogan	Persentase partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	80.00	200,000,000	DAU	80.00	220,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	4.00	80,000,000	DAU	4.00	88,000,000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3.00	120,000,000	DAU	3.00	132,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Grobogan	Persentase peserta yang terfasilitasi dalam PUG	%	63.00	80,000,000	DAU	63.00	88,000,000
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1.00	40,000,000	DAU	1.00	44,000,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026			Prakiraan Maju rencana 2027		
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1.00	40,000,000	DAU	1.00	44,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Grobogan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	-	-		-	-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Grobogan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	-	-		-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Grobogan	Persentase Data Pilah Gender yang tersedia	%	100.00	20,000,000	DAU	100.00	22,000,000
<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Grobogan	<i>Pesentase OPD yang mengumpulkan Data Pilah Gender</i>	%	100.00	20,000,000	DAU	100.00	22,000,000
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2.00	20,000,000	DAU	2.00	22,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Grobogan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	62.00	-		62.00	-

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026				Prakiraan Maju rencana 2027	
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Grobogan	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Nilai	Madya	190,000,000	DAU	Madya	209,000,000
<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Grobogan	<i>Persentase Lembaga yang aktif dalam PHA</i>	%	78.00	50,000,000	DAU	78.00	55,000,000
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	4.00	50,000,000	DAU	4.00	55,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Grobogan		%	68.00	140,000,000	DAU	68.00	154,000,000
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40.00	20,000,000	DAU	40.00	22,000,000
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4.00	120,000,000	DAU	4.00	132,000,000

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026				Prakiraan Maju rencana 2027	
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Grobogan	Menurunnya angka kelahiran	%	21.00	283,200,000	BOKB	21.00	311,520,000
<i>Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Grobogan	<i>Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan RR Klinik KB</i>	<i>Laporan</i>	<i>4.00</i>	<i>283,200,000</i>	<i>BOKB</i>	<i>4.00</i>	<i>311,520,000</i>
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1.00	168,000,000	BOKB	1.00	184,800,000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	115,200,000	BOKB	1	126,720,000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Grobogan	Cakupan peserta KB aktif	%	79.00	3,191,382,000	BOKB	79.00	3,510,520,200
<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	Grobogan	<i>Persentase kualitas pelaksanaan program KB</i>	<i>%</i>	<i>27.00</i>	<i>320,880,000</i>	<i>BOKB</i>	<i>27.00</i>	<i>352,968,000</i>
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	280,896,000	BOKB	1	308,985,600

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026			Prakiraan Maju rencana 2027		
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	Laporan	1	39,984,000	BOKB	1	43,982,400
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKP/PLKB)	Grobogan	Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam POKTAN	%	80.00	105,000,000	BOKB	80.00	115,500,000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kegiatan	5.00	105,000,000	BOKB	5.00	115,500,000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Grobogan	Persentase kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%	84	2,765,502,000	BOKB	84	3,042,052,200
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	93	386,400,000	BOKB	93	425,040,000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	6362	2,379,102,000	BOKB	6362	2,617,012,200

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2026				Prakiraan Maju rencana 2027	
			Target Capaian		Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian	
			Satuan	K				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Grobogan	Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL,PPPKS).	%	90	7,392,000,000	BOKB	90	8,131,200,000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Grobogan	Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	%	80.00	7,392,000,000	BOKB	80.00	8,131,200,000
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Jumlah Laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	3	3,360,000,000	BOKB	3	3,696,000,000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	10	4,032,000,000	BOKB	10	4,435,200,000
JUMLAH					17,181,230,250			18,899,353,275

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2026 terdiri dari 9 (sembilan) program; 23 (dua puluh tiga) kegiatan serta 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan.

Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirumuskan sebesar Rp 17.181.230.250,00 (Tujuh belas milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian pagu indikatif pada urusan Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender sebesar Rp 7.922.000.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) pagu indikatif pada urusan Meningkatnya laju pengendalian penduduk dan kualitas keluarga sebesar Rp 3.474.582.000,00 (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Serta urusan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah sebesar 5.784.648.250 (Lima milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Adapun lebih terperinci dapat disajikan sebagai berikut :

4.1.1 Program

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN;
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA;
5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK;
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA);
7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK;

8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB);
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS).

4.1.2 Kegiatan

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
10. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;

17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

4.2. Matrik Renja OPD Tahun 2026 (RKT Tahun 2026)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DP3AKB KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			22,144,030,000	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			22,144,030,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22,144,030,000	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			8,028,620,000	
2	08	01			I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko	100 %	6,765,764,000
2	08	01	2.01		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	100 %	10,514,000
2	08	01	2.01	0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,514,000
						Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP			10,514,000
2	08	01	2.02		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun sesuai standart Akuntansi Pemerintah	100 %	4,518,210,000
2	08	01	2.02	0001	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4,518,210,000
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4,518,210,000
2	08	01	2.03		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen laporan Penatausahaan Barang yang sesuai Standart yang telah ditetapkan	100 %	9,351,300
2	08	01	2.03	0006	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9,351,300
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			9,351,300
2	08	01	2.05		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dukungan administrasi kepegawaian PD.	100 %	662,510,000

2	08	01	2.05	0003	4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	662,510,000
						<i>Penyediaan Belanja jasa tenaga THL (Honor THL)</i>			662,510,000
2	08	01	2.06		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan administrasi umum PD.	100 %	536,874,000
2	08	01	2.06	0001	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8,173,000
						<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			8,173,000
2	08	01	2.06	0004	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	97,264,000
						<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			97,264,000
2	08	01	2.06	0005	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	46,696,000
						<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			46,696,000
2	08	01	2.06	0006	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	8,400,000
						<i>Penyediaan Surat Kabar Harian</i>			8,400,000
2	08	01	2.06	0007	9	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	46,265,000
						<i>Penyediaan Bahan/Material</i>			46,265,000
2	08	01	2.06	0009	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	330,076,000

						Penyediaan Belanja Perjalanan dinas untuk Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD			330,076,000
2	08	01	2.07		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	110,379,000
2	08	01	2.07	0010	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	110,379,000
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, antara lain LatTop; Printer; AC Split			110,379,000
2	08	01	2.08		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	196,161,500
2	08	01	2.08	0001	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,960,000
						Penyediaan benda Pos dan jasa pengiriman			3,960,000
2	08	01	2.08	0002	13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170,478,500
						Penyediaan Biaya Tagihan Listrik, Ledeng, dan telephone / internet			170,478,500
2	08	01	2.08	0004	14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21,723,000

						Penyediaan sarana dan prsarana Pelayanan Umum Kantor			21,723,000
2	08	01	2.09		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	721,764,200
2	08	01	2.09	0001	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	56,300,000
						Penyediaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 2 Unit kendaraan.			56,300,000
2	08	01	2.09	0002	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	65,635,000
						Penyediaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 5 Unit kendaraan.			65,635,000
2	08	01	2.09	0009	17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	546,493,200
						Penyediaan Biaya Pemeliharaan Gedung dan bangunan Kantor Lainnya		2 Unit	46,493,200
						Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor DP3AKB		1 Unit	500,000,000

2	08	01	2.09	0010	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	53,336,000
						<i>Penyediaan Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya</i>			53,336,000
2	08	02			II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan	10 %	650,000,000
2	08	02	2.01		9	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam struktur organisasi	2.80 %	170,000,000
2	08	02	2.01	0007	19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	4 Laporan	170,000,000
						<i>Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</i>			69,725,200
						<i>Bimbingan Teknis Pengarustamaan Gender (PUG)</i>			26,124,000
						<i>Advokasi dan Fasilitasi Pengarustamaan Gender (PUG)</i>			10,465,400
						<i>Evaluasi Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender (PUG)</i>			63,685,400
2	08	02	2.02		10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas	40 %	340,000,000
2	08	02	2.02	0003	20	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 Lembaga	140,000,000
						<i>Bimbingan Teknis KPPI</i>			12,012,600
						<i>Bimbingan Teknis PUSPA</i>			23,385,800
						<i>Sosialisasi Peran Strategis Perempuan Dalam Politik</i>			59,182,400
						<i>Sosialisasi Peran Strategis Perempuan Dalam Politik</i>			59,182,400
						<i>Sosialisasi Pola Asuh Remaja (PUSPA)</i>			45,419,200

2	08	02	2.02	0008	21	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	450 orang	200,000,000
						<i>Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Dharma Wanita Persatuan (DWP)</i>			136,116,600
						<i>Pembinaan OPD Dharma Wanita Persatuan (DWP)</i>			33,332,000
						<i>Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten Dharma Wanita Persatuan (DWP)</i>			
						<i>Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan (DWP)</i>			33,332,000
						<i>Peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (DWP)</i>			30,551,400
2	08	02	2.03		11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) yang terstandarisasi	71 %	140,000,000
2	08	02	2.03	0007	22	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	70,000,000
						<i>Capacity Building</i>			54,015,400
						<i>Pertemuan Rutin Gabungan Organisasi Wanita (GOW)</i>			15,984,600
2	08	02	2.03	0008	23	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 dokumen	70,000,000
						<i>Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)</i>			70,000,000

2	08	03			III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %	20,000,000
2	08	03	2.03		12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 %	20,000,000
2	08	03	2.03	0009	24	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	20,000,000
						<i>Penguatan Jejaring Pencegahan Perkawinan Usia Anak</i>			10,000,000
						<i>Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan (KDRT dan TPPO)</i>			10,000,000
2	08	04			IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Produktifitas Perempuan	7.5 %	97,500,000
2	08	04	2.02		13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas	40 %	97,500,000
2	08	04	2.02	0005	25	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab / Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	97,500,000
						<i>Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)</i>			14,065,600
						<i>Fasilitasi Hari IBU</i>			41,717,200
						<i>Fasilitasi Hari Kartini</i>			41,717,200
2	08	05			V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di Tingkat Daerah Kab/Kota	65 %	70,000,000
2	08	05	2.01		14	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang memenuhi standar kualitas	100 %	70,000,000
2	08	05	2.01	0004	26	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	40 Lembaga	70,000,000

						Fasilitasi Data Pilah Gender			27,897,600
						Gerakan Sayang Ibu, Bayi, dan Balita (GSIB)			42,102,400
2	08	06			VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan yang Layak Anak (DEKELA)	75 %	425,356,000
2	08	06	2.01		15	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terlibat dalam pelembagaan dan implementasi PHA	78 %	225,718,600
2	08	06	2.01	0003	27	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	225,718,600
						Monitoring dan Evaluasi PATBM			15,208,500
						Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten			35,801,200
						Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas KLA			49,712,700
						Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat			10,797,400
						Kampanye Hari Anak			4,047,700
						Peningkatan Kapasitas Forum Anak			56,746,300
						Pertemuan Forum Anak Kecamatan			26,360,600
						Seminar Hari Anak			27,044,200
2	08	06	2.02		16	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi anak.	76 %	199,637,400
2	08	06	2.02	0005	28	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	40 Orang	50,285,000

						Penanganan Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan			50,285,000
2	08	06	2.02	0006	29	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	149,352,400
						Rakor Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Pornografi.			30,588,600
						Rapat Koordinasi Tim Teknis Swatantra			18,970,800
						Hibah Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Perempuan dan Anak Polres			99,793,000
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			14,115,410,000
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6,608,047,000
2	14	02			VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ASFR 15-19 Tahun	17.55 %	622,340,200
2	14	02	2.02		17	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Pengelohan Data dan Pelaporan	100 %	622,340,200
2	14	02	2.02	0009	30	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	57,816,000
						Penyediaan dukungan operasional untuk pembiayaan pengelolaan keuangan BOKB, ATK, Biaya rapat dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.			57,816,000
2	14	02	2.02	0012	31	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	282,000,000
						Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja oleh IMP dan Sub IMP Bangsa Kencana.			168,000,000
						Penyediaan Biaya Operasioanal oleh Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes.			114,000,000

2	14	02	2.02	0013	32	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	282,524,200
						<i>Penyediaan Biaya Operasional untuk mendukung Pengolahan Data oleh PKB/PLKB</i>			110,124,000
						<i>Penyediaan Biaya Operasioanal untuk Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB di Faskes</i>			58,400,200
						<i>Dukungan SIGA (BOKB) yaitu penyediaan biaya tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>			114,000,000
2	14	03			VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB Aktif	78.5 %	5,855,706,800
2	14	03	2.01		18	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase penduduk yang terdampak Program Bangga Kencana	28 %	1,225,707,000
2	14	03	2.01	0010	33	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	459,420,000
						<i>Penyediaan Biaya Operasional untuk Pembinaan Lini Lapangan di 19 Kecamatan</i>			459,420,000
2	14	03	2.01	0011	34	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	377,340,000
						Fasilitasi pelaksanaan pertemuan/rapat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan Pendampingan Keluarga dan hasil Pemantauan Pendampingan Keluarga di Tingkat Kecamatan.			377,340,000
2	14	03	2.01	0012	35	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	139,427,000

						Penyediaan biaya pembuatan/produksi media yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting. (leaflet; Pembuatan baliho Visual front light; Pembuatan Spanduk dan Balliho; dan Tempat Poster Akrilik)			103,427,000
						Penyediaan biaya penayangan pesan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting (Biaya Penyiaran Spot Radio)			36,000,000
2	14	03	2.01	0014	36	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 Organisasi	249,520,000
						Penyediaan biaya Rapat Koordinasi TPPS dan Mitra Kerja Lainnya Tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung dan memastikan pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.			249,520,000
2	14	03	2.02		19	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	70 %	1,260,000,000
2	14	03	2.02	0004	37	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	347 Orang	1,260,000,000
						Penyediaan Biaya Operasional pelaksanaan KIE oleh Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan di Wilayah Kerjanya.			1,260,000,000
2	14	03	2.03		20	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselurnya alokasi dan sarana penunjang alokasi ke fasilitas kesehatan pelayanan KB	100 %	2,969,469,800
2	14	03	2.03	0001	38	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	85,500,000
						Penyediaan biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi dari Gudang DP3AKB ke Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes. (Biaya pengepakan dan Pengiriman)			85,500,000

2	14	03	2.03	0003	39	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.463 Orang	2,832,631,800
						Penyediaan biaya operasional pergerakan pelayanan KB IUD; KB IMPLANT; MOP; MOW dan Pencabutan IMPLANT			2,832,631,800
2	14	03	2.03	0008	40	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	51,338,000
						<i>Penyediaan biaya pertemuan Koordinasi dengan melibatkan Stakeholder dan Mitra Kerja Lainnya dalam rangka penguatan komitmen dan rekomendasi dalam mengatasi permasalahan dalam peningkatan pelayanan KB.</i>			13,433,000
						<i>Penyediaan biaya pertemuan Koordinasi dengan melibatkan Faskes dan TPMB setara Fasyankes dalam rangka peningkatan pelayanan KB.</i>			37,905,000
2	14	03	2.04		21	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) mandiri	37.07 %	400,530,000
2	14	03	2.04	0006	41	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	79 Kampung	400,530,000
						<i>Orientasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) bagi Pokja dan Pendamping Program di Tingkat Desa/Kelurahan</i>			53,568,000
						<i>Fasilitasi Pertemuan Pokja Kampung KB beserta penggerak lainnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Kampung KB</i>			341,280,000
						<i>Penyediaan Biaya Operasional Penguatan Kampung KB di Tingkat Kabupaten secara konvergen dan terintegrasi antar lintas sektor.</i>			5,682,000

2	14	04			IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA)	74.10 %	7,637,363,000
2	14	04	2.01		22	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PIK- R, dan UPPKA yang Aktif	75 %	214,607,000
2	14	04	2.01	0016	42	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	10 Laporan / Dokumen	19,200,000
						<i>Penyediaan biaya operasional kegiatan PPKS di Balai Penyuluhan.</i>			19,200,000
2	14	04	2.01	43	43	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130,000,000
						<i>pengadaan BKB KIT Stunting bagi 10 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>			130,000,000
2	14	04	2.01	0019	44	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	180 Orang	35,201,000
						<i>Penyediaan biaya operasional untuk pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB</i>			35,201,000
2	14	04	2.01	0021	45	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	30,206,000
						<i>Penyediaan biaya operasional untuk Orientasi Pember-dayaan Ekonomi Keluarga</i>			12,841,000
						<i>Penyediaan biaya operasional untuk Orientasi Satyagraha (PPKS)</i>			9,810,000
						<i>Pameran Tingkat Kabupaten</i>			7,555,000

2	14	04	2.02		23	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Ormas yang aktif dalam program Pembangunan keluarga	100 %	7,422,756,000
2	14	04	2.02	0005	46	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	3,360,000,000
						<i>Penyediaan Biaya Operasional bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) berupa pemberian Paket Pulsa sebesar @ Rp 100.000/bulan selama 12 kali</i>			3,360,000,000
2	14	04	2.02	0006	47	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan / 2380 Keluarga	4,032,000,000
						<i>Penyediaan Biaya Operasional dukungan pelaksanaan rangkaian lingkup kegiatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebesar @ Rp 120.000 selama 10 kali dalam satu tahun.</i>			4,032,000,000
2	14	04	2.02	0007	48	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	3 Laporan	30,756,000
						<i>Pembinaan Kader dan Anggota BKR</i>			30,756,000
J U M L A H									22,144,030,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2026 merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) ini menjadi pedoman dalam mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja ini harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, oleh karena itu dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan secara optimal.

Penyusunan rencana yang baik akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam kerangka itulah Rencana Kerja ini disusun secara bertahap agar dapat membantu terwujudnya Visi Kabupaten Grobogan.



KEPALA DP3AKB
KABUPATEN GROBOGAN

INDARTININGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001

